JURNAL ILMU EKONOMI (JIE)
Vol. 02 No. 2, Agustus 2023
https://risetekonomi.com/jurnal/index.php/jie
E-ISSN : 2985-4652

ANALISA KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN KESINAMBUNGAN PENYELENGGARAAN LAYANAN PUBLIK

(Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2012-2021)

Nora Picicia[1], Wahidin[2], Wahyunadi[3]

[1,2,3] Universitas Mataram, Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRACT

Regional Government Financial Capacity is the finansial capacity of each region in managing the planned programs. The implementation of region finance in knowing the description of regional financial management is carried out through an analysis of the implementation of the APBD. Therefore, the implementation of Public Services by Regional Governments by providing facilities or infrastructure is financed from the Capital Expenditure budget allocation. The purpose of this study is analyze to what extent the financial capacity/ability of the Regional Government in optimizing its revenue from the Regional Original Revenue (PAD) and Balancing Funds to maintain the continuity of the implementation of Public Services through the allocation of Capital Expenditures to Regencies/Cities in the Province of NTB. This type of research is include in quantitative research with an associative strategy. The research technique was carried out by searching secondary data which was processed using a computer, namely Eviews 12. The results of the study show that PAD (X1) has no significant effect on Public Services through Capital Expenditures (Y), Balancing Funds (X2) hasa significant effect on Public Service Through Capital Expenditure (Y), and together PAD (X1) and Balance Fund (X2) has a positive and significant effect on Public Services through Capital Expenditures (Y) in the Regencies/Cities of the NTB Province.

Keywords: *Regional Government Financial Capacity, Public Service, APBD*

ABSTRAK

Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah merupakan kemampuan keuangan masing-masing daerah dalam mengelola program yang telah direncanakan. Implementasi keuangan daerah dalam mengetahui gambaran pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui analisis pelaksanaan APBD. Oleh karena itu, penyelenggaraan Layanan Publik oleh Pemerintah Daerah dengan penyediaan sarana atau prasarana dibiayai dari alokasi anggaran Belanja Modal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sampai sejauh mana kapasitas/kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan pendapatannya dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan untuk mempertahankan kesinambungan penyelenggaraan Layanan Publik melalui alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif dengan strategi asositif. Teknik penelitian dilakukan dengan pencarian data sekunder yang diolah dengan menggunakan komputer yaitu Eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD (X1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pelayanan Publik melalui Belanja Modal (Y), Dana Perimbangan (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap Pelayanan Publik melalui Belanja Modal (Y), dan secara bersama-sama PAD (X1) dan Dana Perimbangan (X2) berpengaruh positif dan sgnifikan terhadap Pelayanan Publik melalui Belanja Modal (Y) di Kabupaten/Kota Provinsi NTB.

Kata Kunci: *Kapasitas Keuangan Pemda, Pelayanan Publik, APBD*

RIWAYAT ARTIKEL
Tanggal Masuk: 17-08-2023
Tanggal Diterima: 29-08-2023
Tersedia *Online*: 30-08-2023

KORESPONDENSI:
Nama : Nora Picicia
E-mail: norapicia0008@gmail.com

DOI:
https://doi.org/10.59827/jie.v2i2.84
PENERBIT:
Laboratorium Riset Ekonomi

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai subsistem pemerintahan negara dimaksudkan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan kata lain mengoptimalkan mutu jangkauan pelayanan dan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah telah memberikan kewenangan dalam penyelenggarakan pemerintah daerah secara lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan perimbangan tugas, fungsi, dan peran antar pemeirntah pusat dan pemerintah daerah membuat masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang memadai guna menunjang tanggung jawab (Safitri, 2016). Sehingga dampak dari otonomi daerah yakni adanya desentralisasi fiskal yang merupakan pendistribusian tanggung jawab pengambilan keputusan dan pengelolaan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai salah satu pilarnya (Mulyono; (Nugroho, 2016).

Melalui adanya otonomi diharapkan daerah dapat meningkatkan kualitas pemerintah dalam hal melayani publik dan mempermudah dalam mengontrol pemakaian dana yang telah dikumpulkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun penerimaan rutin dalam APBD yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari daerah yang bersangkutan dengan sumber anggaran terdiri dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Salah satu upaya pemerintah daerah dalam menekan ketergantungan suatu daerah pada pemerintah pusat yakni dengan mengadakan pembiayaan mandiri dari PAD pemerintah daerah (Sholikhah & Priyono, 2022). Melalui alokasi belanja yang tepat, diharapkan dapat mewujudkan kondiis atau kapasitas keuangan pemerintah daerah yang memadai guna mempertahankan kesinambungan penyelenggaraan layanan publik yang djalankan dengan bertumpu pada PAD (Nugroho, 2016).

Berdasarkan pernyataan Sekjen Fitra NTB, Ramli Ernanda bahwa total belanja daerah seluruh Pemda di NTB pada APBD 2020 tercatat sekitar Rp.22,4 triliun. Hingga semester 1 2020, realisasi belanja daerah di NTB mencapai 31,9 persen. Dalam hal ini serapan belanja pemerintah provinsi NTB dan Kota Mataram tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Meskipun perekonomian NTB selama tahun 2019 secara kumulatif mengalami pertumbuhan sebesar 1,01 persen, namun demikian, pada kenyataannya kemandirian daerah sampai saat ini masih rendah atau ketergantungan kepada pusat masih tinggi yang dapat ditinjau dari APBD provinsi NTB dengan jumlah PAD tahun 2019 mencapai 31% atau Rp.1.708.660.958.875 dibandingkan dengan Pendapatan Transfer 65% atau Rp. 3.604.324.985.800. meskipun sudah terdapat pertumbuhan PAD dalam Provinsi NTB (berturut-turut 2017,2018, dan 2019 sebesar 29%, 30%, dan 31%), namun porsi belanja rutin dalam APBD masih relative tinggi (berturut-turut sebesar 64%, 65%, dan 67&). Selain itu, PAD dan Dana Transfer masih lebih banyak dialokasikan Pemda untuk belanja operasional rutin, bukan pada Belanja Modal, padahal peningkatan Belanja Modal sangat diharapkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat guna penyelenggaraan Layanan Publik.

Realita di lapangan menunjukkan berbagai sumber pendapatan yang dimiliki daerah lebih banyak dialokasikan untuk belanja aparatur dibandingkan dengan belanja untuk publik. Pernyataan ini senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Kanwil

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Syarwan, SE,MM mengungkapkan realisasi belanja Pemerintah Provinsi dan 10 Pemda Kabupaten/Kota periode Januari-Februari baru 49%. Belanja 11 Pemda masih didominasi belanja pegawai sebesar Rp.335,5 miliar atau 12.34%. Sedangkan belanja publik seperti belanja barang baru Rp.109,8 miliar atau 3,31%, belanja modal baru Rp.29 miliar atau 1,28% dan belanja transfer baru Rp.43 miliar atau 1,17%.

Berdasarkan pengalaman tersebut maka penggunaan dana perimbangan oleh pemerintah daerah untuk alokasi belanja daerah perlu dipertimbangkan lagi. Provinsi NTB pada tahun 2021 memiliki total pendapatan APBD sebesar Rp.5.326 triliun, sedangkan realisasi PAD sebesar Rp.1.888 trilun atau 83,62% dari target yang ditetapkan. Namun, untuk pembangunan daerah terdapat transfer dari pemeirntah pusat sebesar Rp.3.343 triliun atau 99,62% dari target yang ditetapkan. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah provinsi NTB masih bergantung lebih banyak kepada pemerintah pusat.

Tabel 1. Rincian Realisasi APBD di Provinsi NTB Tahun 2021 (*Dalam Miliar Rupiah)*

Keterangan	**PAD**	**Dana Perimbangan**	**Belanja Daerah**
2017	1.684.468	3.268.927	5.488.040
2018	1.719.188	3.281.371	5.778.854
2019	1.807.482	3.342.865	5.499.754
2020	1.815.690	3.310.586	5.716.743
2021	1.888.456	3.343.953	5.621.732

Sumber Data: APBD Provinsi NTB

Berdasrkan data di atas proporsi pendapatan APBD masih besar berasal dari Dana Transfer atau Perimbangan untuk memenuhi Belanja Daerah. Perbandingan antara PAD di Provinsi NTB memiliki proporsi yang masih relatif kecil dalam APBD, walaupun PAD mengalami kenaikan maupun penurunan setiap tahun, namun hal ini belum cukup memnuhi proporsi Belanja Daerah. Sehingga dalam APBD Provinsi NTB masih banyak bergantung dari Pendapatan Transfer atau Perimbangan dari Pemerintah Pusat.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis ingin meneliti lebih lanjut perkembangan kapasitas keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2017-2021. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisa Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah dan Kesinambungan Layanan Publik (Studi Kasus pada Kabupaten/ Kota di Provinsi NTB Tahun 2017-2021).

TELAAH LITERATUR

A. Kajian Teori

a. Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07 Tahun 2022 tentang Peta Kapsitas Fiskal Daerah Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa "*Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-maisng daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu*

dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu dan pengeluaran tertentu".

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan implementasi dari pengelolaan keuangan daerah, sehingga untuk dapat mengetahui gambaran pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap pelaksanaan APBD. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya dalam Pasal 280 ayat (2); menyatakan bahwa kewajiban penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah: (i) Mengelola dana secara efektif, efisien, transaparan dan akuntabel; (ii) Menyingkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan (iii) Melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan. Adapun kinerja keuangan daerah dalam pelaksanaan APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

1. Pendapatan Daerah

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang didapat dan digunakan sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah guna mewujudkan desentralisasi. Menurut Halim dalam (Sri et al., 2020) menyatakan bahwa "Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah". Sehingga dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang ada di dalam wilayah daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku (Apriliawati & Handayani, 2016). Adapun akumulasi PAD merupakan pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, dan penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam.

2) Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah Pusat mengalokasikan sejumlah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai dana perimbangan yaitu: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.

2. Belanja Daerah

Berdasarkan Pasal 298 UU Nomor 23 Tahun 2014 khususnya yang membahas tentang Belanja Daerah, telah dijelaskan beberapa hal sebagai berikut: (i) Belanja Daerah dioptimalkan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (ii) Belanja Daerah berpedoman pada Standar Teknis dan Standar

Harga Satuan Regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta (iii) Belanja Daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berpedoman pada Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Harga Satuan Regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu: (i) Belanja Tidak Langsung, dan (ii) Belanja Langsung.

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Adapun Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

3. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran.

b. Pelayanan Publik dalam Anggaran Daerah

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan. Untuk mewujudkan pelayanan publik kepada masyarakat, pemerintah daerah akan mengalokasikan dana dalam APBD untuk membiayai program kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut dalam tahun anggaran tertentu. Sehingga kinerja Pelayanan Publik pemerintah daerah bisa dinilai dari besarnya alokasi pada tiap-tiap jenis belanja daerah dalam APBD yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat/publik seperti peningkatan pembangunan insfrastruktur di daerah yakni melalui Belanja Modal. Belanja Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah.

c. Hubungan PAD dan Tingkat Pelayanan Publik

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan iuran langsung yang berasal dari pengembangan potensi daerah seperti pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Kaitan antara PAD dengan Pelayanan Publik melalui alokasi Belanja Modal merupakan sumber pembiayaan untuk anggaran Belanja Modal. Tanggung Jawab pemerintah daerah kepada masyarakat dengan cara memberikan Pelayanan Publik (*Publik Service)* yang baik untuk masyarakat melalui anggaran Belanja Modal, oleh karena itu masyarakat telah memberikan sebagian anggaran melalui PAD kepada pemerintah. Bentuk Pelayanan Publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dengan penyediaan sarana atau prasarana tersebut dibiayai dari alokasi anggaran Belanja Modal dalam APBD. Jaya dan Dwirandra dalam

(Susanti & Fahlevi, 2016) menyebutkan PAD yang tinggi akan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Pelayanan Publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan Belanja Modal.

d. Hubungan Dana Perimbangan dan Tingkat Pelayanan Publik

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Menurut Ardhani dalam (Susanti, 2016) Pemerintah Daerah dapat menggunakan Dana Perimbangan untuk memberikan Pelayanan Publik yang direalisasikan melalui Belanja Modal. Sehingga semakin besar Dana Perimbangan yang diperoleh daerah, maka tingkat Pelayanan Publik semakin meningkat melalui alokasi Belanja Modal. Selain itu, Dana Perimbangan dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah yang dimana semakin besar alokasi Dana Perimbangan yang diterima daerah maka daerah tersebut masih sangat bergantung kepada Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanja daerah khususnya Belanja Modal yang digunakan untuk Pelayanan Publik.

B. Penelitian Terdahulu

1) Julis Tamawiy, Julie J Sondakh, & Jessy D.L Waroongan (2016) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara)". Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertumbuhan PAD, Desentralisasi Fiskal, Efektivitas Keuangan Daerah, Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh signifikasi terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota di provinsi Sulawesi Utara baik secara parsial simultan,dengan nilai F hitung sebesar 4.665 dengan signifikasi 0,003. Dari nilai *adjust R Square,* didapatkan bahwa 19,9% dependen variabel dapat dijelaskan oleh variasi dari 4 variabel independen.
2) Nadya Ayu Delima, TTaufik Marwa, & Anna Yulianita (2016) melakukan penelitian yang berjudul "Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal untuk Pelayanna Publik di Sumatera Bagian Selatan". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan daerah yang meliputi rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas dan rasio efisiensi terhadap belanja modal untuk pelayanan publik. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio efektivitas dan efisiensi berpegaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan rasio kemandirian tidak berpengaruh signifikan. Hal ini dikarenakan nilai rata-rata belanja modal untuk pelayanan publik sebesar 15,60 dimana lebih unggul dibidangkesehatan, pendidikan, pembangunan, dan teknologi yang masih dikembangkan.
3) Prayudi Nugroho (2016) melakukan penelitian dengan judul "Analisis Atas Kapasitas Keuangan Pemda untuk Mempertahankan Kesinambungan Penyelenggaraan Pelayanan Publik". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sampai sejauh mana kapasitas keuangan pemda untuk mempertahankan kesinambungan penyelenggaraan layanan publik. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun PAD dan DAU secara signifikan secara statistic terhadap Belanja Modal (<0,05), tapi ternyata DAU lebih berpengaruh terhadap Belanja Modal daripada PAD. Hal ini

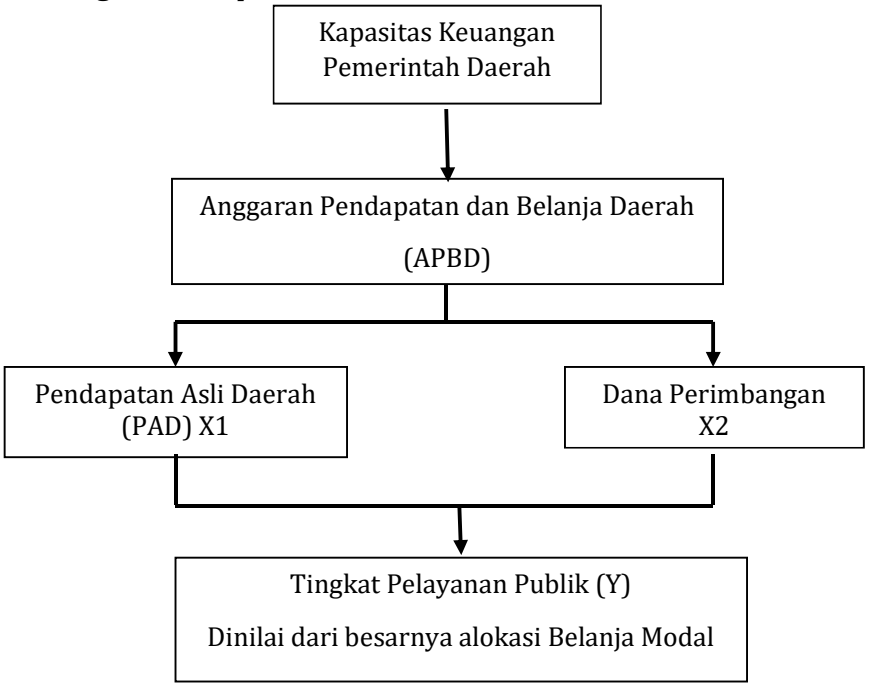
dikarenakan sebagian besar belanja modal masih bergantung pada DAU bukan PAD, meskipun terdapat pertumbuhan dalam PAD.

C. Perumusan Hipotesis

Hipotesis 1 (H1): Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikasi terhadap Tingkat Pelayanan Publik melalui Belanja Modal

Hipotesis 2 (H2): Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikasi terhadap Tingkat Pelayanan Publik melalui Belanja Modal

D. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Jenis Penelian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016) penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism. Hal ini digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ *statistic* dengan tujuan untuk menguji hipotesis.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan Daerah Provinsi NTB dengan mengambil data melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB dengan data laporan realisasi APBD di Provinsi NTB selama periode 2017-2021.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang mengamati salah satu atau bagian dari elemen/ lembaga atau perusahaan. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan populasi Kabupaten/Kota di Provinsi NTB.

Teknik dan ALat Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan pencarian data sekunder yang mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada instansi yang diteliti dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan memperoleh data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB yaitu Realisasi APBD Tahun 2017-2021. Adapun pengolahan data adalah dengan menggunakan computer yaitu dengan *Eviews 12.*

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan realisasi APBD pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTB periode 2017-2021 dan data-data statistik pendukung.

Variabel Penelitian

Variabel merupakan suatu sifat yang dapat memiliki berbagai macam nilai yang biasa diekspresikan dalam bentuk simbol/ lambang (umumnya digunakan simbol x dan y) yang padanya dilekatkan bilangan atau nilai. Variabel dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis: (i) variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2); (ii) variabel dependen yaitu tingkat Pelayanan Publik (Y).

a. Pendapatan Asli Daerah (X1)
   Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh suatu daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana anggaran ini diakui sebagai hak penambah kekayaan bersih dalam anggaran tertentu. Adapun indikator pengukuran analisis yang digunakan yakni total realisasi PAD dengan skala nominal yang ditetapkan APBD.
b. Dana Perimbangan (X2)
   Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun indikator yang digunakan yakni total realisasi Dana Perimbangan dengan skala nominal yang ditetapkan dalam APBD.

c. Tingkat Pelayanan Publik (Y)

Tingkat pelayanan publik pemerintah daerah bisa dinilai dari besarnya alokasi pada tiap-tiap jenis belanja daerah dalam APBD yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat/ publik yakni melalui belanja modal. Belanja modal untuk mengukur kinerja pelayanan publik diindikasikan oleh Belanja Tanah, Belanja Gedung atau Bangunan, Belanja Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan serta Aset tetap lainnya.

Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Dalam pengambilan dan pengumpulan data merupakan suatu cara atau proses dalam mengambil dan mengumpulkan data secara rinci, seperti metode mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini prosedur pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan kepustakaan.

Prosedur Analisis Data

Prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deksriptif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian.

Adapun analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis model ekonometrika yaitu analisis regresi data panel dengan tujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Menurut (Basuki & Prawoto, 2019) regresi data panel merupakan teknik regresi yang menggabungkan data runtut waktu (*time series)* dengan data silang (*cross section).* Data panel dalam penelitian ini adalah penggabungan antara data *cross section* (data 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat) dan data *time series* (data dari tahun 2017-2021) yang akan diolah dengan bantuan alat analisis statistik *EViews 12*. Basuki (2016) menyatakan bahwa dalam metode regresi data panel dapat menggunakan tiga teknik model pendekatan, yaitu (i) *Common Effect Model (CEM)*; (ii)*Fixed Effect Model (FEM); dan* (iii) *Random Effect Model REM)*

Uji Spesifikasi Pemilihan Model

1. Uji Chow

Uji Chow merupakan uji untuk memilih antara model *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model* yang akan digunakan. Apabila hasil dari uji spesifikasi menunjukkan nilai probablitas Chi-Square <0,05 maka model yang akan dipilih adalah *fixed effect model.* Sedangkan nilai probablitas Chi-Square >0,05, maka model yang akan dipilih adalah *common effect model.* Jika model yang dipilih adalah *fixed effect* maka harus dilakukan uji selanjutnya yaitu uji Hausman. Jika model yang dipilih adalah *common effect* maka harus dilakukan uji selanjutnya yaitu uji Lagrange Multiplier.

2. Uji Hausman

Uji Hausman adalah uji untuk mengetahui apakah lebih baik menggunakan *random effect model* (REM) atau *fixed effect model* (FEM). jika hasil dari uji spesifikasi menunjukkan nilai probablitas Chi-Square <0,05, maka model *random effect* sesuai untuk digunakan. Sedangkan nilai probablitas Chi-Square >0,05, maka model *fixed effect* sesuai digunakan untuk regresi data panel.

3. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji LM dugunakan ketika model yang terpilih pada uji Hausman adalah *random effect model* (REM). Untuk mengetahui model manakah yang lebih baik antara model *random effect* atau model *common effect.* Uji LM ini didasarkan pada *probability* Breusch-Pagan, apabila nilai *probability* Breusch-Pagan kurang dari nilai alpha (0,05) berarti regresi data panel adalah *random effect model* dan sebaliknya, apabila nilai *probability* Breusch-Pagan lebih dari nilai alpha (0,05) berarti regresi data panel adalah *common effect model.*

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji yang digunakan untuk terbebas dari penyimpangan asumsi klasik seperti gejala heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolineritas. Menurut (Basuki & Prawoto, 2019) dalam data panel tidak perlu melakukan semua uji asumsi klasik, tetapi asumsi klasik yang wajib dipenuhi adalah uji asumsi klasik multikolineritas dan heteroskedastsitas.

1. Multikolineritas

Uji multikolinieritas dilakukan apabila regresi linier menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Dengan demikian, karena dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas, maka uji Multikolinieritas dilakukan dalam penelitian ini. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen.

2. Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisistas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Jika varians dari residual tetap disebut homoskedastisitas, namun jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Winarno & Wahyu, 2015). Homoskedastisitas merupakan model regresi yang baik.

Estimasi Regresi Data Panel

Metode yang digunakan adalah regresi berganda, karena membahas tiga buah variabel independen dan satu buah variabel dependen. Untuk mendukung hasil dan akurasi penelitian, data penelitian yang diperoleh akan dianalisis dengan alat statistik melalui bantuan program *Eviews 12* untuk mempermudah di dalam penelitian. Sehingga model data panel dalam penelitian ini berdasarkan variabel-variabel yang digunakan dapat diaplikasikan dalam sebuah model regresi data panel sebagai berikut:

$Y = a + b_1 X1_{it} + b_2 X2_{it} + e$

Berdasarkan model tersebut dapat diketahui, Y merupakan variabel dependen sedangkan X merupakan variabel independen. N menunjukkan jumlah data yang diobservasi, sedangkan T menunjukkan banyaknya tahun atau waktu yang dianalisis dalam suatu penelitian.

Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen

lainnya konstan (Ghozali & Ratmono, 2013). Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikasi sebesar 0,05 atau α=5%.

Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik F)

Menurut Ghozali & Ratmono (2013) mengatakan bahwa Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Ghozali & Ratmono (2013) menjelaskan koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Spesifikasi Model

Untuk mengetahui metode yang paling efisien dari tiga model persamaan yaitu *Common Effect Model* (CEM)*, Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) perlu diuji masing-masing model tersebut dengan menggunakan metode estimasi regresi data panel.

1) Uji Chow

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	10.123227	(9,38)	0.0000
Cross-section Chi-square	61.153558	9	0.0000

Berdasarkan uji *chow* menunjukkan bahwa nilai probablitas *Chi-Square* sebesar 0,0000< 0,05, artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian, model yang paling sesuai dalam mengestimasi persamaan regresi adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

2) Uji Hausman

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	79.711933	2	0.0000

Berdasarkan hasil uji Hausman menunjukkan bahwa nilai *probability* 0,000 < 0,05 yang berarti estimasi yang tepat dalam regresi data panel dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model.*

Uji Asumsi Klasik

1) Uji Multikolineritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolineritas

	PAD	PERIMBANGAN
PAD	1.000000	0.525718
PERIMBANGAN	0.525718	1.000000

Hasil yang diperoleh dari uji multikolineritas menunjukkan nilai korelasi antar variabel independen (PAD dan Dana Perimbangan) kurang dari 0,80 (x < 0,80) yakni sebesar 0,52718. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolineritas antar variabel independen dalam model regresi data panel.

2) Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.27E+10	9.35E+10	-0.670753	0.5064
PAD	0.124161	0.172659	0.719112	0.4765
PERIMBANGAN	0.092681	0.082982	1.116878	0.2711

Hasil yang diperoleh dari uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai probablitas > 0,05 dimana nilai PAD sebesar 0,4765>0,05 dan Dana Perimbangan sebesar 0,2711>0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam model regresi data panel.

Estimasi Regresi Data Panel

Berdasarkan pemilihan model estimasi persamaan regresi dengan uji *chow* dan uji Hausman maka dapat diketahui bahwa model persamaan regresi data panel yang tepat adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Adapun hasil estimasi regresi data panel dengan *fixed effect model* yakni:

Tabel 6. Hasil Uji *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: Pelpub
Method: Panel Least Squares
Date: 07/21/23 Time: 14:19
Sample: 2017 2021
Periods included: 5
Cross-sections included: 10
Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-8.30E+11	1.06E+11	-7.816550	0.0000
PAD	0.309190	0.196164	1.576177	0.1233
PERIMBANGAN	0.999416	0.094279	10.60063	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	3.85E+10	R-squared	0.851741
Mean dependent var	2.84E+11	Adjusted R-squared	0.808824
S.D. dependent var	1.01E+11	S.E. of regression	4.42E+10
Akaike info criterion	52.06812	Sum squared resid	7.43E+22
Schwarz criterion	52.52700	Log likelihood	-1289.703
Hannan-Quinn criter.	52.24287	F-statistic	19.84626
Durbin-Watson stat	1.827099	Prob(F-statistic)	0.000000

Adapun hasil persamaan regresi data panel dalam penelitian ini yakni:

Y = a + b_1X1_{it}+ b_2X2_{it}+e

Pelpub = -8.300059 + 0.3091190*PAD + 0.99416*Dana Perimbangan

Hasil persamaan dengan regresi linear data panel di atas, dapat menginformasikan hal-hal sebagai berikut:

a. Nilai konstan sebesar 8,30006 artinya apabila variabel PAD (X1) dan Dana Perimbangan (X2) dianggap konstan, maka Belanja Modal akan berkurang sebesar 830006 satu-satuan.
b. Koefisien X1 PAD sebesar 0,30918 yang menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen lain bersifat tetap dan PAD (X1) mengalami kenaikan sebesar satu-satuan maka Belanja Modal Publik bertambah sebesar 0,30918 satu-satuan.
c. Koefisien X2 Dana Perimbangan sebesar 0,99941 menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen lain bersifat tetap dan Dana Perimbangan (X2) mengalami kenaikan sebesar satu-satuan maka Belanja Modal bertambah sebesar 0,99941 satu-satuan.

Uji Parameter Individual (Uji Statistik t)

Berdasarkan nilai t tabel dengan jumlah sampel (n) = 50, jumlah variabel (k) = 2, taraf signifikan α = 0,05/2 = 0,025 (uji 2 sisi); *degree of freedom* (df) = n-k = 50-2 = 48 sehingga diperoleh nilai t tabel sebesar ± 2.021. Sehingga hasil uji variabel independen diperoleh:

a. Nilai t hitung PAD (X1) sebesar 1,5761 < dari nilai t tabel sebesar 2.021. Sedangkan nilai signifikasi P=0,1233 > 0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak, yang berarti variabel PAD (X1) tidak berpengaruh secara signifikasi terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik

b. Nilai t hitung Dana Perimbangan (X2) sebesar 10,6006 > dari nilai t tabel sebesar 2.021. Sedangkan nilai siggnifikasi P=0,000 < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti variabel Dana Perimbangan (X2) berpengaruh secara signifikasi terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik.

Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik F)

Nilai F tabel pada α = 5% dengan df numerator (k-1) = 1, dan df denominator (n-k) =48, maka dapat diperoleh nilai F tabel sebesar 4,06 untuk nilai F hitung sebesar 19,8462. Dapat disimpulkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel sehingga menerima Ha dan menolak H0. Sedangkan menurut nilai probablitas hasil regresi diperoleh probablitas F hitung adalah 0,00000 lebih kecil dari 0,05 maka menerima Ha dan menolak H0. Artinya secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikasi terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan tabel besar angka Adjusted R-Square (R^2) adalah sebesar 0,808824. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 80%. Atau dapat diartikan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model ini mampu menjelaskan 80% terhadap variabel dependennya. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar model regresi tersebut.

Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik

Hasil uji t menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikasi terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik. Hal ini menandakan bahwa jumlah sebagian besar realisasi PAD lebih kecil daripada target yang ditetapkan, dimana mengindikasikan apabila suatu keuangan daerah dikatakan tidak efektif maka menimbulkan asumsi daerah tersebut merealisasikan jumlah anggaran belanja modal rendah khususnya untuk kepentingan publik (Tamawiwy, et.al, 2016). Tujuan pengukuran dilihat dari data yang ada masih banyak daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTB yang jumlah realisasi PAD masih relatif kecil daripada target yang dianggarkan, sehingga untuk membiayai belanja publik sangat kurang atau tidak mencukupi melalui biaya PAD.

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Prayudi Nugroho (2016) "Analisis Atas Kapasitas Keuangan Pemda Untuk Memepertahankan Kesinambungan Pelayanan Publik" menyatakan bahwa ternyata DAU (salah satu bagian dari Dana Perimbangan) lebih berpengaruh terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik daripada PAD. Hal ini dikarenakan sebagian besar Belanja Modal untuk Pelayanan Publik masih tergantung pada Dana Perimbangan salah satunya yakni Dana Alokasi Umum, bukan pada PAD meskipun terdapat pertumbuhan dalam PAD pada tiap periode.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik

Hasil uji t menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikasi terhadap kinerja pelayanan publik. Dalam hal ini apabila Dana Perimbangan yang merupakan sumber anggaran daerah mengalami peningkatan, maka dana yang dimiliki

oleh pemerintah daerah untuk alokasi Belanja Modal akan ikut meningkat. Namun, hal ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan lebih berpengaruh terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik daripada PAD, sehingga ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih besar karena tingkat capaian PAD yang masih rendah, sehingga diharapkan pemerintah daerah mulai meningkatkan PAD dan mengurangi Dana Perimbangan sebagai unsur total pendapatan daerah guna meningkatkan kemandirian daerah.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sri Sulastri Dewi (2019) "Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap belanja Modal Daerah di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan" menunjukkan bahwa selama tahun 2015-2018 dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal daerah di Kabupaten Takalr Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan peningkatan dana perimbangan setiap tahunnya, peningkatan dana perimbangan tersebut sebagian besar bersumber dari Pemerintah Pusat.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2) terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik (Y)

Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTB dari tahu 2017 sampai 2021 menunjukkan bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Peirmbangan berpengaruh signifikasi terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik. Hal ini dapat diartikan bahwa laba atau profit tentu berhubungan dengan besarnya pembiayaan yang disalurkan serta menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTB berhasil dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui alokasi Belanja Modal.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Endang Maya Lestari (2019) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap belanja Modal pada Kabupaten Pada Lawas" menunjukkan bahwa variabel PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal. Fungsi dari dana perimbangan ini menyerupai PAD yaitu sebagai membiayai kebutuhan belanja daerah termasuk salah satunya belanja modal. Meskipun dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat, ternyata banyak daerah yang masih bergantung pada dana perimbangan dalam mendanai kebutuhan belanja modal.

Langkah Lanjutan Kemandirian Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kesinambungan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Data di atas menunjukkan bahwa otonomi daerah hingga saat ini masih belum terwujud secara signifikan. Hal ini dikarenakan ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat yang masih besar karena tingkat capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah dan proporsi bantuan pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan yang justru cenderung lebih tinggi daripada proporsi PAD terhadap total pendapatan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Mardiasmo dalam (Nugroho, 2016) yaitu bahwa harapan Pemerintah Daerah yang muncul sebelum era otonomi berupa keinginan untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri, namun dari tahun ke tahun terasa semakin jauh dari kenyataan karena yang terjadi

adalah adanya ketergantungan fiskal, subsidi, dan bantuan pusat yang menggambarkan ketidakberdayaan PAD untuk membiayai Belanja Daerah.

Seiring dengan peningkatan pemberian layanan publik, diharapkan kontribusi masyarakat semakin meningkat dan penerimaan PAD menjadi semakin tinggi. Kontribusi pemerintah pusat yang nantinya semakin menurun seiring dengan meningkatnya kemampuan daerah untuk meningkatkan PAD sangat mungkin terjadi karena semakin luasnya kesempatan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi PAD yang dimilikinya. Namun dengan demikian, pemerintah daerah harus mencegah adanya eksploitasi yang berlebihan terkait upaya peningkatan PAD seperti melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah. Hal ini akan menyebabkan masyarakat semakin terbebani dan mengancam perekonomian daerah secara makro.

Dalam hal ini upaya yang dapat dilakukan yakni melalui pengoptimalan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mencari, menampung, dan merealisasikan harapan/ aspirasi masyarakat. Dengan demikian, secara tidak langsung terdapat peran serta aktif masyarakat untuk ikut serta mengambil keputusan tentang apa yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD guna memadai belanja daerah dan memacu perkembangan pembangunan daerah guna mewujudkan kemandirian daerah dan meningkatkan penyelenggaraan layanan publik.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh secara signifikasi terhadap Pelayanan Publik melalui Belanja Modal. Hal ini didasarkan pada nilai t hitung sebesar 1.5761< dari nilai t tabel sebesar 2.021. Sedangkan nilai signifikasi P=0,1233 > 0,05 yang berarti H0 diterima dan Ha ditolak;
2) Dana Perimbangan berpengaruh secara signifikasi terhadap Pelayanan Publik. Hal ini didasarkan pada nilai t hitung sebesar 10.6006> dari nilai t tabel sebesar 2.021. Sedangkan nilai signifikasi P=0,000 < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima; dan
3) PAD (X1) dan Dana Perimbangan (X2) secara bersama-sama berpengaruh signifikasi terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik (Y). Hal ini didasarkan pada nilai F hitung sebesar 19.8462 > dari F tabel sebesar 4.06 dan probablitas F hitung adalah 0,00000 < 0,05, maka Ha diterima dan H0 ditolak.

B. Saran

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi NTB untuk dapat mengintensifkan sumber penerimaan PAD yang ada dan Dana Perimbangan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat sehingga dapat meningkatkan Pelayanan Publik yang direalisasikan melalui alokasi Belanja Modal dalam APBD pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTB

REFERENSI

Apriliawati, K., & Handayani, N. (2016). Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Jawa Tmur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* , 15.

Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2019). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis: DIlengkapi Aplikasi SPSS dan Eviews.* Rajawali Pers.

BYSUARANTB.COM. (2019, Februari 21). *Belanja Publik Seret, Belanja Aparatur Terserap Rp333,5 Miliar*. Retrieved from SUARANTB: https://www.suarantb.com/2019/02/21/belanja-publik-seret-belanja-aparatur-terserap-rp3355-miliar/

DATA, N. S. (2022). *APBD Provinsi NTB*. Retrieved from data.ntbprov.go.id

Delima, N. A., Marwa, T., & Yulianita, A. (2016). Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik di Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, 14*.

Ghozali, I., & Ratmono, D. (2013). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika, Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 8.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

ntb.bpk. (2020, Juli 1). *Semester I 2020, Serapan APBD Lima Kabupaten Lebih Rendah Dibandingkan 2019*. Retrieved from ntb.bpk.go.id: https://ntb.bpk.go.id/semester-i-2020-serapan-apbd-lima-kabupaten-lebih-rendah-dibandingkan-2019/

Nugroho, P. (2016). Analisa Atas Kapasitas Keuangan Pemda untuk Mempertahankan Kesinambungan Penyelenggaraan Layanan Publik. *Jurnal Informasi Keuangan dan Akuntansi, 5*.

Peraturan Mentersi Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/ 2022 tentang Kapasitas Fiskal Daerah

Safitri, S. (2016). Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah*.

Sholikhah, A., & Priyono, N. (2022). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Komponen PAD pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen, 2*.

Sri, A., Rahmat, W., & Yuliansyah. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta. *Jurnal STIE Indonesia (STEI)*.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta.

Susanti, S., & Fahlevi, H. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JMEKA), 1*, 183-191.

Tamawiwy, J., Sondakh, J. J., & Warongan, J. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Auditing, 7*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Winarno, & Wahyu, W. (2015). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

LAMPIRAN

Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi NTB TA 2017-2021

Keterangan	Tahun	PAD
Kota Mataram	2017	386.958.232.873,50
	2018	358.825.822.208,30
	2019	373.951.422.339,15
	2020	363.165.361.010,56
	2021	392.556.124.241,49
Kab. Lombok Barat	2017	290.993.583.144,35
	2018	216.921.279.505,90
	2019	247.115.353.485,16
	2020	219.038.703.946,65
	2021	294.901.152.910,97
Kab. Lombok Tengah	2017	286.691.384.414,65
	2018	187.324.721.970,60
	2019	204.512.599.142,12
	2020	206.419.405.625,90
	2021	163.077.512.900,58
Kab. Lombok Timur	2017	398.088.460.541,31
	2018	261.716.109.844,72
	2019	289.621.500.124,36
	2020	328.110.520.620,86
	2021	386.846.220.594,48
Kab. Lombok Utara	2017	150.949.553.107,29
	2018	131.074.968.618,97
	2019	146.771.642.719,75
	2020	103.450.107.036,12
	2021	87.395.724.277,85
Kab. Sumbawa Barat	2017	171.632.855.262,26
	2018	66.810.357.193,03
	2019	72.869.945.142,29
	2020	119.961.988.394,16
	2021	141.792.639.534,35
Kab. Sumbawa	2017	249.526.156.524,27
	2018	143.943.921.430,24
	2019	163.931.325.130,96
	2020	181.311.990.391,99
	2021	202.856.374.328,41
Kab. Dompu	2017	134.347.580.708,99
	2018	93.289.123.515,60

	2019	105.458.909.851,32
	2020	110.684.931.583,11
	2021	125.823.619.290,05
Kab. Bima	2017	188.203.814.216,05
	2018	120.342.972.756,52
	2019	135.874.141.560,57
	2020	131.585.549.042,49
	2021	141.708.257.765,90
Kota Bima	2017	52.465.170.257,96
	2018	46.115.436.512,62
	2019	50.422.855.052,89
	2020	47.279.817.936,69
	2021	46.993.516.746,67

Data Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi NTB TA 2017-2021

Keterangan	Tahun	Dana Perimbangan
Kota Mataram	2017	941.446.451.427,00
	2018	881.001.320.170,00
	2019	895.596.778.015,00
	2020	822.946.728.374,00
	2021	851.520.949.645,00
Kab. Lombok Barat	2017	1.139.364.531.692,00
	2018	1.108.259.612.429,00
	2019	1.286.853.526.986,00
	2020	1.088.277.768.451,00
	2021	1.073.521.262.302,00
Kab. Lombok Tengah	2017	1.428.941.613.611,00
	2018	1.449.014.029.739,00
	2019	1.537.058.189.781,00
	2020	1.463.851.768.432,00
	2021	1.470.614.387.274,00
Kab. Lombok Timur	2017	1.799.863.950.121,00
	2018	1.773.089.842.500,00
	2019	1.857.307.038.867,00
	2020	1.614.549.612.383,00
	2021	1.755.134.902.377,00
Kab. Lombok Utara	2017	609.345.962.783,00
	2018	603.594.314.676,00
	2019	729.311.511.427,00
	2020	554.766.257.516,00
	2021	570.504.845.486,00

Kab. Sumbawa Barat	2017	947.736.048.799,00
	2018	859.228.101.375,00
	2019	737.894.118.952,00
	2020	607.731.267.486,00
	2021	735.951.702.560,00
Kab. Sumbawa	2017	1.228.407.760.375,00
	2018	1.194.041.315.627,00
	2019	1.314.892.538.873,00
	2020	1.113.575.545.472,00
	2021	1.124.318.926.116,00
Kab. Dompu	2017	788.453.061.399,00
	2018	831.712.835.842,00
	2019	872.694.411.933,00
	2020	736.761.752.360,00
	2021	747.467.753.727,00
Kab. Bima	2017	1.269.755.514.037,00
	2018	1.329.968.127.945,00
	2019	1.348.821.946.185,00
	2020	1.254.603.995.069,00
	2021	1.269.627.636.325,00
Kota Bima	2017	707.754.462.556,00
	2018	640.693.906.827,00
	2019	643.423.884.046,00
	2020	587.547.659.216,00
	2021	594.010.197.074,00

Data Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi NTB TA 2017-2021

Keterangan	**Tahun**	**Belanja Modal**
Kota Mataram	2017	334.493.514.237,90
	2018	316.822.207.186,35
	2019	331.560.943.664,74
	2020	209.066.411.335,00
	2021	185.546.615.534,20
Kab. Lombok Barat	2017	391.441.279.288,44
	2018	316.234.946.086,30
	2019	444.728.409.289,83
	2020	356.379.430.819,00
	2021	204.504.713.135,50
Kab. Lombok Tengah	2017	368.525.406.802,30
	2018	358.935.169.908,00
	2019	413.387.700.591,62

	2020	282.545.185.043,79
	2021	225.852.588.845,75
Kab. Lombok Timur	2017	469.901.093.897,58
	2018	376.735.950.185,59
	2019	463.870.415.435,88
	2020	283.379.396.328,34
	2021	406.726.755.902,58
Kab. Lombok Utara	2017	271.701.021.216,58
	2018	202.431.644.452,80
	2019	336.234.222.051,40
	2020	127.934.302.726,00
	2021	134.498.413.840,94
Kab. Sumbawa Barat	2017	451.763.415.779,55
	2018	357.027.117.555,50
	2019	236.256.296.589,65
	2020	118.634.085.260,00
	2021	146.866.035.673,10
Kab. Sumbawa	2017	405.536.014.371,00
	2018	322.613.421.606,22
	2019	445.885.992.082,80
	2020	214.265.796.608,00
	2021	184.389.798.067,00
Kab. Dompu	2017	244.716.757.895,42
	2018	247.498.690.591,00
	2019	248.747.006.027,00
	2020	133.176.502.913,50
	2021	137.602.403.344,52
Kab. Bima	2017	291.584.599.818,00
	2018	396.655.454.032,04
	2019	316.134.322.769,10
	2020	256.022.945.964,00
	2021	261.575.868.883,00
Kota Bima	2017	244.959.737.987,00
	2018	234.618.482.307,94
	2019	191.649.681.895,71
	2020	165.721.375.475,02
	2021	138.378.990.564,74